

Dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba diperbankan: Peranan Mekanisme Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit

Viska Anggraita
(Universitas Indonesia)

Abstract

We investigate the effects of PSAK 50/55 (2006 revision) adoption on earning management in banking industry, and the way the corporate governance, ownership structure, and audit quality moderate these effects. We use 36 samples of bank in Indonesia (private and public) over 2009 and 2010 period. The main findings are: 1) earning management as proxied by discretioner loan loss provision has decrease after the adoption of PSAK 50/55 (2006 revision) ; 2) Corporate governance and family control weaken the decrease in the earning management after PSAK 50/55 (2006 revision) adoption; 3) Foreign control and auditors quality as proxied by audit specialization strengthen the decrease in the earning management after PSAK 50/55(2006 revision) adoption.

Key words: corporate governance, ownership structure, audit quality, earning management, loan loss provision, financial instrument accounting, PSAK 50/55 (2006 revision)

PENDAHULUAN

PSAK 50/55 (revisi 2006) yang merupakan adopsi standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) tentang Instrumen Keuangan adalah PSAK yang kontroversial terutama karena dampaknya yang besar pada industri perbankan di Indonesia. PSAK ini merupakan standar akuntansi yang kompleks sehingga penerapannya terutama di Industri perbankan dimana instrumen keuangan adalah komponen utama dari aset dan liabilitas bank membutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan investasi dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia.

Dampak utama dari PSAK 50/55 (revisi 2006) adalah dalam valuasi pencadangan kredit bermasalah dimana penekanannya adalah pada objektivitas dalam menentukan Cadangan Kerugian penurunan Nilai (CKPN) dari kredit yang diberikan yang harus berdasarkan data historis 3 tahun kebelakang, dan juga adanya keharusan valuasi debitur secara individual. Sebelumnya perhitungan CKPN berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dimana terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria penentuan kualitas kredit beserta persentase pencadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing klasifikasi kualitas kredit. Bila diterapkan dengan benar maka penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) akan meningkatkan akurasi dan keinformatifan CKPN. Namun demikian karena sifat PSAK 50/55 (revisi 2006) yang *principle based* dan menekankan pada konsep maka pada penerapannya dapat memberikan ruang yang lebih bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Ditambah lagi karena tingkat kompleksitas yang tinggi dari PSAK 50/55 (revisi 2006) maka bila sumber daya manusia baik dari akuntan internal perusahaan maupun auditor eksternal serta teknologi informasi belum siap/tersedia maka dapat menyebabkan tingkat akurasi diragukan.

Terlepas dari pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berdasarkan IFRS, kualitas laba perusahaan tergantung pada mekanisme *corporate governance* baik eksternal (sistem hukum, *legal enforcement*, regulasi, kualitas audit) maupun internal (dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan). Standar akuntansi yang berkualitas tinggi saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laba bila *corporate governance* pada tingkat negara ataupun perusahaan

lemah. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. Duh et al. (2009) menemukan corporate governance mengurangi pengaruh negatif dari penerapan IAS no 36 (mengenai *impairment of assets*) terhadap kualitas laba di perusahaan non keuangan di Taiwan. Namun sebaliknya Piot et al. (2011) menemukan bahwa auditor Big 4 menyebabkan perilaku akuntansi yang agresif setelah penerapan IFRS yang diukur dengan menggunakan *conditional conservatism*. Piot et al. (2011) juga menemukan peningkatan *unconditional conservatism* setelah penerapan IFRS pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4. Jamal dan Tan (2011) menemukan bahwa tipe auditor mempengaruhi kesuksesan penerapan IFRS dimana IFRS akan meningkatkan kualitas laba bila auditornya adalah tipe “*principle based oriented*”. Hasil temuan ini menunjukkan pentingnya peranan mekanisme corporate governance (baik internal maupun eksternal) dalam kesuksesan penerapan IFRS dalam rangka meningkatkan kualitas laba.

Bank memiliki dua karakteristik khusus yang menyebabkan perlunya analisis terpisah mengenai tata kelola (governance) di bank. Pertama bank pada umumnya lebih *opaque* (kabur) dibandingkan perusahaan non keuangan. Penelitian terdahulu membuktikan asimetri informasi yang lebih besar terjadi pada industri perbankan dibanding industri lain (Furfine, 2001 dalam Levine, 2004). Di perbankan kualitas kredit yang diberikan tidak dapat secara langsung diobservasi dan dapat disembunyikan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu bank dapat dengan cepat mengganti komposisi resiko aset mereka sehingga bank dapat menyembunyikan masalah dengan memperpanjang kredit kepada klien yang sebenarnya tidak dapat memenuhi kewajiban sebelumnya (Levine, 2004). Kedua, bank dan institusi keuangan yang lain beroperasi pada lingkungan yang sangat teregulasi karena kondisi (kesehatan) perekonomian sangat dipengaruhi oleh kondisi (kesehatan) industri keuangan. Selain itu jumlah stakeholder perbankan yang banyak (investor, pemegang saham, masyarakat yang menyimpan dana di bank, dan kreditor) menyebabkan meningkatnya kompleksitas tata kelola (corporate governance) di bank.

Corporate Governance pada bank di Indonesia diatur oleh peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) yaitu Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 yang isinya mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance*, bagi bank umum. Bagi bank yang *go public* selain

mematuhi peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia juga harus mematuhi aturan Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Bapepam. Adanya campur tangan regulator dalam tata kelola perbankan menyebabkan terdapat perbedaan yang sistematis antara governance perbankan dan perusahaan biasa (Adams dan Mehran (2003) dan Macey and O'Hara (2003)). Sehingga aspek-aspek mekanisme corporate governance dan pengaruhnya terhadap kualitas laba sangat mungkin berbeda dengan corporate governance di perusahaan non keuangan.

Penelitian diluar negeri yang serupa dengan penelitian mengenai dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) di Indonesia adalah penelitian mengenai dampak dari penerapan IAS 39 (*Financial Instruments*). Penelitian-penelitian ini pada umumnya meneliti mengenai dampak dari penerapan *fair value option* (FVO) berdasarkan IAS 39 terhadap volatilitas laba di perbankan. Fietcher (2011) dengan menggunakan sampel 221 bank dari 41 negara menemukan bahwa bank yang menggunakan FVO dapat mengurangi volatilitas laba yang disebabkan *accounting mismatch*. Fietcher juga menemukan bukti lemah bahwa volatilitas laba bank-bank tersebut mengalami penurunan setelah penerapan FVO dibandingkan sebelum penerapan FVO. Namun demikian Fietcher tidak mengontrol adanya kemungkinan bank melakukan *earning smoothing* melalui *loan loss provision*. Penelitian yang sejenis adalah penelitian penerapan SFAS 159 yang mengatur mengenai akuntansi nilai wajar. Barth et al.(1995) memberikan bukti empiris bahwa penerapan akuntansi nilai wajar berdasarkan SFAS 159 menyebabkan peningkatan volatilitas laba bank. Song (2008) tidak menemukan bukti adanya perubahan volatilitas laba karena penerapan FVO berdasarkan SFAS 159. Di Indonesia peneliti belum menemukan penelitian mengenai dampak penerapan PSAK 50/55 terhadap kualitas laba di perbankan.

Belum adanya penelitian yang meneliti mengenai pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba di perbankan serta peranan corporate governance atas dampak tersebut **memotivasi** dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba di perbankan. Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana pengaruh corporate governance yang meliputi mekanisme internal corporate governance bank, struktur kepemilikan, dan kualitas auditor eksternal terhadap pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba di perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini ingin menyelidiki secara empiris beberapa **pertanyaan** sebagai berikut: 1) Apakah terjadi peningkatan praktik manajemen laba melalui cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan (CKPN) pada bank-bank di Indonesia setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006)?; 2) Apakah kualitas mekanisme *corporate governance* internal perusahaan turut berperan dalam pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap kecenderungan bank-bank di Indonesia dalam melakukan manajemen laba melalui CKPN?; 3) Apakah struktur kepemilikan (kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing) turut berperan dalam pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap kecenderungan bank-bank di Indonesia dalam melakukan manajemen laba melalui CKPN?; 4) Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap kecenderungan bank-bank di Indonesia dalam melakukan manajemen laba melalui CKPN?. Secara umum penelitian ini **bertujuan** untuk memberikan bukti empiris mengenai mengenai pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba di perbankan serta peranan *corporate governance* atas dampak tersebut.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam kerangka hubungan keagenan (*agency theory*) adanya masalah keagenan disebabkan karena konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, kontrak yang tidak lengkap serta adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Secara umum ada dua jenis masalah keagenan dalam perusahaan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul karena pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen (Tipe I) dimana manajemen berperilaku oportunistik seperti manajer menggunakan dana perusahaan untuk pembelian fasilitas manajer yang berlebihan, *shirking*, atau penggunaan laba perusahaan untuk investasi yang kurang menguntungkan perusahaan. Masalah keagenan tipe I banyak terjadi pada perusahaan dimana struktur kepemilikan perusahaan menyebar secara luas pada berbagai pihak sebagai investor dengan proporsi kepemilikan masing-masing investor yang relatif kecil seperti di Amerika Serikat. Kepemilikan yang kecil menyebabkan investor kurang memiliki insentif untuk

melakukan *monitoring* pada manajer secara langsung. Jenis yang kedua adalah masalah keagenan yang timbul karena adanya konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Tipe 2). Pemegang saham pengendali pada umumnya juga menjadi manajer di perusahaan atau paling tidak menunjuk manajer pilihannya, sehingga berpotensi untuk mendahulukan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas melalui *tunneling* atau *expropriation*. Masalah keagenan tipe II ini sering terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan bentuk pyramidal seperti dibanyak negara di Asia seperti Korea, Thailand, Philipine, dan Indonesia.

Adanya masalah keagenan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, serta adanya asimetri informasi, dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya insentif bagi pihak-pihak tertentu untuk memberikan angka laba yang salah atau untuk menyembunyikan informasi (Sivaramakhrisnan dan Yu, 2008). Untuk mengatasi membatasi perilaku oportunistik manajer, perusahaan dapat menggunakan kombinasi berbagai mekanisme *corporate governance* baik mekanisme internal *corporate governance* (dewan komisaris (Fama dan Jensen, 1983) dan komite-komite lainnya, monitoring pemegang saham mayoritas (Demsetz dan Lehn, 1985), berbagai insentif manajerial (Jensen dan Murphy, 1990); dan faktor eksternal seperti ancaman pengambil alihan (Grossman dan Hart, 1988), persaingan produk (Jensen, 1983), pasar tenaga kerja (Fama, 1980) dan auditor eksternal.

Corporate Governance di Perbankan

Menurut Monks (2003) Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sedangkan Shleifer dan Vishny (1997) mendefinisikan corporate governance sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

Penerapan Good Corporate Governance di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 yang isinya mengatur mengenai pelaksanaan good

corporate governance (GCG) bagi bank umum. Peraturan ini mengatur tiga aspek GCG yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Struktur Kepemilikan Bank-bank di Indonesia

Kepemilikan bank-bank di Indonesia bervariasi ada bank milik pemerintah dan swasta, domestik, dan asing. Berdasarkan kepemilikannya bank-bank di Indonesia dapat dibagi menjadi lima yaitu: 1) Bank milik pemerintah yaitu bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah seperti Bank Negara Indonesia 46 (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ; 2) Bank milik swasta nasional yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional (contohnya Bank Central Asia dan Bank Danamon); 3) Bank milik koperasi yaitu bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh badan hukum koperasi; 4) Bank milik asing merupakan cabang dari bank luar negeri seperti Citibank, ABN AMRO, Standard Chartered Bank); dan 5) Bank campuran yaitu bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Bank di Indonesia yang dimiliki swasta banyak yang dikendalikan oleh keluarga seperti bank BCA, bank Mega dan bank Pundi. Bank-bank di Indonesia terutama bank swasta dan bank campuran banyak yang mendaftarkan sahamnya di Bursa Saham Indonesia (BEI). Bank-bank yang terdaftar di BEI selain harus memenuhi aturan Bank Indonesia juga harus memenuhi aturan Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam).

Dampak Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) terhadap perbankan

PSAK 50/55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan merupakan adopsi standar akuntansi keuangan internasional (IFRS). Penerapan PSAK revisi ini berdampak signifikan terhadap industri perbankan terutama terkait dengan penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN) atau *loan loss provision*. Sebelumnya penghitungan CKPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (No.7 /2/PBI/2005 dan perubahannya No.8/2/PBI/2006, No.9/6/PBI/2007, dan No.11/2/PBI/2009). Didalam peraturan ini ditetapkan kriteria penentuan kualitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) beserta persentase pencadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing klasifikasi kualitas kredit. Sedangkan berdasarkan pada PSAK 50/55 (revisi 2006) lebih memberikan penekanan pada bukti objektif yang menjadi dasar dari penurunan nilai tersebut dan juga penekanan bahwa evaluasi akan

adanya penurunan tersebut dilakukan pada setiap tanggal neraca. Dimana perhitungan CKPN estimasi dilakukan secara individual dan kolektif dan membutuhkan data-data *probability of default* dan kerugian historis minimal 3 tahun kebelakang dan untuk kolektif dibutuhkan data-data kerugian historis yang pernah dialami aset-aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok aset keuangan tersebut.

Selain berdampak pada penentuan CKPN (*loan loss provision*), PSAK 50/55 (revisi 2006) juga berdampak terhadap perlakuan investasi efek tertentu terkait dengan masalah reklasifikasi antar instrumen keuangan yang lebih ketat dibandingkan PSAK 50 (1998). PSAK 50 (1998) memperbolehkan perusahaan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangannya, dengan mengakui keuntungan atau kerugian. Sedangkan berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) perlakuan reklasifikasi antar instrumen keuangan lebih ketat.

Di India seperti juga di Indonesia, Firoz et al. (2011) berdasarkan studi mengenai dampak penerapan IAS 39 mengenai instrumen keuangan dan IFRS 9 mengenai klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan pada perbankan di India menemukan bahwa penerapan kedua standar ini akan sangat mempengaruhi industri perbankan terutama dalam klasifikasi financial aset yang lebih ketat dan valuasi pencadangan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan portfolio piutang. Selain itu untuk penurunan nilai pinjaman, IFRS mengajukan model yang berdasarkan kerugian yang diekspektasi (*expected loss*) dan bukan kerugian yang terjadi (*incurred loss*).

Pengembangan hipotesis

Industri perbankan adalah industri dengan regulasi yang ketat dibandingkan industri lain, misalnya bank harus memenuhi rasio kecukupan modal minimum. Laporan Keuangan adalah salah satu alat utama yang digunakan Bank Indonesia untuk melakukan monitoring bank-bank di Indonesia sehingga ada insentif dari manajemen bank untuk melakukan manajemen laba guna memenuhi aturan Bank Indonesia. Selain itu manajemen bank juga memiliki insentif untuk meratakan laba untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan dalam rangka menurunkan resiko. Gebhardt, Lee, dan Swami(2001) membuktikan bahwa premi resiko konsisten lebih tinggi pada bank komersial dan bahwa variabilitas laba dan prediktabilitas laba adalah faktor kunci yang menjelaskan perbedaan *cross section* dari premi resiko.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah merupakan salah satu komponen akrual yang besar di bank. Penentuan CKPN membutuhkan unsur *judgemental* yang tinggi sehingga memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Myer (1990), Beatty et al. (1995), dan Collins et al. (1995) menemukan bukti manajemen melakukan manajemen laba untuk memenuhi kecukupan modal menggunakan *loan charge off* (penghapusan loan loan provision). Kanagaretnam et al. (2004) menemukan bahwa bahwa manajer melakukan perataan laba melalui *loan loss provision* (LLP) untuk mengurangi variabilitas laba. Di Indonesia Setiawati dan Naim (2001) dan Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menemukan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan Bank Indonesia yang digunakan untuk menentukan apakah bank sehat atau tidak.

Penerapan PSAK 50/55 (2006) meningkatkan kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba melalui CKPN. Hal ini disebabkan karena adanya larangan reklasifikasi antar instrumen keuangan yang ketat menyebabkan berkurangnya ruang bagi manajemen untuk melakukan perataan laba melalui reklasifikasi antar kelompok instrumen. Penelitian terdahulu menemukan manajer menggunakan diskresinya untuk mengatur waktu realisasi dari keuntungan dan kerugian dari sekuritas yang dimiliki (Beatty dan Haris, 1999). Karena keuntungan atau kerugian dari instrumen keuangan adalah alat alternatif untuk melakukan manajemen laba selain melalui CKPN hal ini meningkatkan kecenderungan manajemen laba melalui CKPN meningkat. Selain itu walaupun perhitungan CKPN menggunakan PSAK 50/55 (2006) lebih ketat dan objektif dibandingkan PSAK sebelumnya namun demikian mengandung unsur penilaian (*judgement*) yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kecenderungan manajemen laba melalui CKPN. Berdasarkan argumen tersebut maka hipotesa yang diajukan adalah:

H1: Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) meningkatkan praktek manajemen laba pada bank - bank di Indonesia

Berdasarkan teori keagenan terdapat hubungan antara corporate governance dan informasi akuntansi (Bushman dan Smith 2001; Sloan 2001). Dalam konteks pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau *loan loss provision* mekanisme Corporate governance bank akan mengurangi peningkatan manajemen laba yang disebabkan karena penerapan PSAK 50/55 (revisi

2006) dengan dua cara. Pertama, pengaruhnya terhadap proses manajemen resiko. Corporate governance yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kualitas proses manajemen resiko (Bies 2006). Manajemen resiko yang efektif memberikan manajemen alat dan kualitas data yang lebih baik untuk mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan (*loan loss provision*) berdasarkan PSAK 50/55 (revisi, 2006). Brown dan Caylor (2005) menemukan perusahaan dengan corporate governance yang buruk memiliki dinilai oleh pasar lebih rendah, memiliki resiko yang lebih tinggi, dan fluktuasi harga saham yang lebih tinggi. Kedua melalui mekanisme *monitoring*. Corporate governance yang berkualitas tinggi akan memiliki kualitas monitoring yang lebih tinggi pula sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer ataupun pemegang saham pengendali seperti manajemen laba melalui CKPN (*loan loss provision*). Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) dengan menggunakan data bank *go public* di Indonesia selama tahun 2000-2004 menemukan mekanisme corporate governance yaitu komposisi dan ukuran dewan komisaris serta keberadaan komite audit mengurangi manajemen laba di bank. Berdasarkan argumen yang dipaparkan sebelumnya maka hipotesis yang dikemukakan:

H2: Corporate Governance yang berkualitas mengurangi peningkatan praktek manajemen laba yang disebabkan karena penerapan PSAK 50/55

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan keluarga dapat mengurangi atau memperburuk masalah keagenan. Kepemilikan keluarga dapat mengurangi masalah keagenan tipe I karena tiga faktor. Pertama, perusahaan keluarga cenderung tidak terdiversifikasi dan memiliki posisi ekuitas yang terkonsentrasi pada perusahaan sehingga pemilik perusahaan (keluarga) memiliki insentif yang lebih kuat untuk memonitor manajer (Demsetz dan Lehn, 1985). Kedua, keluarga pada umumnya memiliki pengetahuan yang lebih mengenai usaha perusahaan sehingga bisa lebih baik dalam melakukan *monitoring* manajer (Anderson dan Reeb, 2003). Ketiga, keluarga cenderung memiliki pandangan investasi jangka panjang daripada pemegang saham lain sehingga mengurangi kesalahan investasi yang dilakukan manajer (James, 1999; Kwak, 2003; Stein, 1988).

Namun demikian pada perusahaan keluarga dimana keluarga pendiri memiliki pengendalian yang besar yang hak suara (*voting right*) mereka melebihi hak atas arus kas (*cash flow right*) yang dimiliki, dan apabila terdapat kepentingan minoritas dalam perusahaan maka dapat menimbulkan

masalah keagenan yaitu konflik kepentingan antara kepemilikan mayoritas (keluarga) dengan kepemilikan minoritas (masalah keagenan tipe II) (Siregar, 2005). Keluarga pengendali dapat mencari keuntungan pribadi dengan cara melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) (Anderson & Reeb, 2003) atau melalui *managerial entrenchment* (Shleifer dan Vishny, 1997). Konsisten dengan pendapat ini, Faccio *et al.*(2001) menyatakan bahwa perusahaan keluarga cenderung untuk melakukan ekspropriasi kesejahteraan dari pemegang saham eksternal ketika tingkat pengendalian mereka lebih tinggi daripada *cashflow right* yang dimiliki. Pendapat-pendapat ini mengindikasikan bahwa masalah keagenan tipe II dapat terjadi pada perusahaan keluarga dan bahkan masalah ini lebih parah dibandingkan masalah keagenan tipe I.

Arifin (2003) dalam Siregar dan Utama (2008) menemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga masalah keagenannya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikendalikan pihak publik atau tanpa pengendali utama. Namun demikian di Indonesia banyak perusahaan konglomerasi dimana sebagian besar kekayaan pemilik tidak terkonsentrasi tetapi menyebar pada beberapa perusahaan sehingga jika hanya sedikit kekayaan pemilik yang berada pada perusahaan *go public*. Maka walaupun perusahaan *go public* tersebut dikendalikan keluarga masalah ekspropriasi pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas sangat mungkin terjadi. Besar kemungkinan masalah keagenan tipe II ini melebihi masalah keagenan tipe I (masalah keagenan antara pemilik dan manajer). Karena manajemen perusahaan pada umumnya dipegang keluarga, maka mereka memiliki keleluasan untuk pengambilan keputusan strategis. Manajemen dapat dengan mudah melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dengan menginvestasikan sumber daya perusahaan untuk kepentingan personal dan keseluruhan nilai group. Kondisi tersebut memberikan insentif bagi pemilik perusahaan (keluarga) yang merupakan bagian dari konglomerasi untuk melakukan manajemen laba yang oportunistik untuk menutupi ekspropriasi yang dilakukannya. Dalam konteks dengan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) yang sifatnya *principle based* memberikan diskresi yang lebih leluasa bagi manajemen (keluarga) untuk melakukan manajemen laba melalui *loan loss provision* (CKPN) dibandingkan PSAK sebelumnya (PSAK 55 (1998)).

Berdasarkan argumen ini maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3a: Pengendalian bank oleh keluarga memperkuat peningkatan praktek manajemen yang disebabkan karena penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006)

Di Indonesia banyak bank yang dikendalikan oleh institusi asing baik dalam bentuk cabang dari bank asing ataupun melalui bank campuran. Bank yang dimiliki asing, biasanya merupakan bagian dari organisasi bank yang besar, sehingga secara umum menghadapi skala ekonomi dan *diseconomies* seperti institusi besar yang dimiliki oleh domestik. Bank yang dimiliki asing memiliki keuntungan karena memiliki akses yang lebih ke pasar modal, kemampuan yang lebih besar untuk mendiversifikasi resiko, kemampuan untuk memberikan jasa kepada klien-klien multinasional yang tidak bisa diberikan oleh bank domestik (Berger et al., 2003). Namun demikian bank asing juga memiliki kelemahan karena adanya masalah pengendalian dari jauh, berhadapan dengan berbagai lingkungan ekonomi dan sistem regulasi, dan secara umum memiliki informasi kuantitatif yang lebih sedikit mengenai kondisi lokal (Berger, Dai, Ogena dan smith, 2003).

Dalam konteks penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), bank yang dimiliki oleh asing memiliki kelebihan karena memiliki akses yang lebih terhadap teknologi yang superior, terutama teknologi informasi untuk pengumpulan dan penilaian informasi kuantitatif. PSAK 50/55 (revisi 2006) dalam penerapannya membutuhkan bersifat lebih objektif dan harus berdasarkan data historis 3 tahun kebelakang, dan juga adanya keharusan valuasi debitur secara individual. Dengan teknologi informasi yang lebih superior harusnya bank asing dapat memiliki informasi kuantitatif yang lebih akurat dan andal untuk perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) dibandingkan bank domestik. Selain itu dari segi sumber daya manusia, bank asing juga umumnya memiliki sumber daya yang lebih berkualitas karena pelatihan-pelatihan dari kantor pusatnya yang pada umumnya ada di negara maju.

Berdasarkan argumen di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3b: Pengendalian bank oleh asing memperlambat peningkatan praktek manajemen laba yang disebabkan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006)

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai peluang bersama untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material pada laporan keuangan. Temuan kesalahan tersebut tergantung pada kualitas auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut dan dorongan ini akan tergantung pada independensi auditor.

Pengukuran kualitas audit selain dengan menggunakan ukuran kantor akuntan (*Big* dan *Non Big*) adalah dengan menggunakan spesialis industri. Auditor spesialis industri adalah auditor yang dilatih dan memiliki pengalaman yang terpusat (terkonsentrasi) pada satu industri (Solomon, *et al.*, 1998). Seperti didiskusikan dalam Gramling dan Stone (1998), penggunaan spesialis industri harusnya memberikan kualitas audit yang lebih tinggi karena: (i) teknologi yang lebih baik (Dopuch dan Simunic, 1980), (ii) biaya yang lebih rendah karena *economies of scale* (Caves, 1992), atau (iii) pengetahuan yang lebih baik karena *economies of knowledge*. Ditambah lagi beberapa penelitian mengenai perilaku dan studi eksperimental menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan industri yang dimiliki auditor dan kinerja auditor (*task-level*). Studi ini menunjukkan auditor dengan pengetahuan spesifik industri lebih besar kemungkinannya memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik perusahaan, sehingga meningkatkan kemampuan dan metodologi mereka dalam mendeteksi kesalahan (Maletta dan Wright, 1996; Owsoho *et al.*, 2002). Solomon *et al.* (1998) menemukan bahwa pengetahuan spesifik industri mempengaruhi kinerja auditor terutama dalam tugas analisa spesifik industri.

PSAK 50/55 (2006) memberikan penekanan pada bukti objektif yang menjadi dasar dari perhitungan penurunan nilai (CKPN). Dalam perhitungannya membutuhkan banyak estimasi seperti tingkat *recovery rate*, *support group*, tingkat diskonto dan lain-lain. Sifat dari PSAK 50/55 (revisi 2006) yang *principle based* membutuhkan auditor dengan kemampuan (teknis) yang tinggi dan pemahaman yang lebih mengenai prinsip prinsip akuntansi serta transaksi-transaksi perbankan. Spesialisasi auditor menjadi penting karena dengan pengalaman yang lebih dalam mengaudit industri perbankan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dalam estimasi CKPN. Penelitian Kanagaretnam *et al.* (2010) dengan menggunakan sampel bank dari 29 negara

menemukan auditor spesialis industri dapat mengurangi perilaku manajemen laba melalui *loan loss provision*.

Berdasarkan argumen tersebut maka hipotesa yang diajukan adalah:

H4: Kualitas audit yang diukur dengan proksi auditor spesialis mengurangi peningkatan praktek manajemen laba yang disebabkan karena penerapan PSAK 50/55

Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dalam lampiran

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang ada di Indonesia selama periode 2009-2010. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 1) Bank-bank di Indonesia baik yang *go public* maupun yang tidak *go public* selama periode 2009-2010; 2).Bank yang mempublikasikan laporan tahunannya untuk periode 31 Desember 2009-2010 di *website* mereka; 3) Data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba dan untuk variabel corporate governance (data kepemilikan dan *selfassessment corporate governance* indeks tersedia; 4) Bank telah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) secara penuh ditahun 2010.

Sampel akhir yang digunakan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel adalah 36 bank terdiri dari 19 bank yang *go public* dan 17 bank tidak *go public*. Sehingga total observasi adalah 72 tahun perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu : (a) data praktek CG di bank ; (b) data kepemilikan bank; (c) Laporan tahunan bank-bank di Indonesia; (d) laporan keuangan bank; dan (e) laporan tata kelola bank. Informasi mengenai struktur kepemilikan diperoleh dari laporan tahunan. Sedangkan indeks Corporate Governance komposit diperoleh dari laporan tata kelola bank tiap tahunnya.

Model Penelitian

Model 1 (tanpa moderasi kualitas corporate governance dan struktur kepemilikan)

Penelitian ini menduga terjadi peningkatan praktek manajemen laba melalui *loan loss provision* (cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)) pada bank-bank di Indonesia setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006):

Spesifikasi regresi Model 1 adalah sebagai berikut :

$$DLLP_{it} = \beta_0 + \beta_1 POST_{it} + \beta_2 CG_{it} + \beta_3 SPEC_{it} + \beta_4 CONFAM_{it} + \beta_5 CONFOR_{it} + \beta_6 GOVT_{it} + \beta_7 EBPT_{it} + \beta_8 PYLLP_{it} + \beta_9 GROWTH_{it} + \beta_{10} SIZE_{it}, \dots \dots \dots (model 1)$$

Dimana

Variabel Dependen:

$DLLP_{it}$ = komponen diskresioner dari cadangan kerugian penurunan nilai (*loan loss provision*) dibagi total aset awal tahun.

Variabel Independen:

$POST_{it}$ = dummy variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan telah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) , dan 0 jika lainnya

Variabel kontrol:

CG_{it} = kualitas corporate governance bank diukur dengan menggunakan dummy variabel, diberi nilai 1 jika indeks komposit GCG lebih kecil dari median (CG berkualitas tinggi) dan 0 jika lainnya.

$SPEC_{it}$ = dummy variabel diberi nilai 1 jika bank i pada tahun t diaudit oleh kantor akuntan yang merupakan spesialis di industri perbankan dan 0 jika lainnya.

$CONFAM_{it}$ = dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah keluarga.

$CONFOR_{it}$ = dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah pihak asing (baik institusi keuangan ataupun perusahaan asing)

$GOVT_{it}$ = dummy variabel diberi nilai 1 jika bank adalah bank yang dikendalikan pemerintah (pusat dan daerah) dan 0 jika lainnya

$EBPT_{it}$ = laba sebelum pajak dan CKPN pada tahun t dibagi total aset awal tahun

$PYLLP_{it-1}$ = loan loss provision tahun sebelumnya dibagi total aset awal tahun

SIZE_{it} = Ukuran bank diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset akhir tahun

GROWTH_{it} = pertumbuhan total aset dari total aset awal tahun t

β_1 mencerminkan perubahan kecenderungan melakukan manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Dugaannya adalah setelah penerapan PSAK 50/55 (2006) terjadi peningkatan manajemen laba yang dilakukan bank bank di Indonesia ($\beta_1 > 0$).

Model 2 (dengan moderasi kualitas corporate governance dan struktur kepemilikan)

Corporate governance diduga mampu mengurangi peningkatan manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Pengujian dugaan ini dilakukan dengan memoderasikan variabel penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) (POST) dengan dummy variabel corporate governance (CG, SPEC, CONFAM, CONFOR) dengan model 2 berikut:

$$DLLP_{it} = \beta_0 + \beta_1 POST + \beta_2 CG_{it} + \beta_3 SPEC_{it} + \beta_4 CONFAM_{it} + \beta_5 CONFOR_{it} + \beta_6 POST * CG_{it} + \beta_7 POST * SPEC_{it} + \beta_8 POST * CONFAM_{it} + \beta_9 POST * CONFOR_{it} + \beta_{10} GOV_{it} + \beta_{11} EBTP_{it} + \beta_{12} PYLLP_{it} + \beta_{13} GROWTH_{it} + \beta_{14} SIZE_{it}, t, \dots \dots \dots (model 2)$$

Pengujian dugaan peranan variabel corporate governance (SPEC, CG, CONFAM, CONFOR) dilakukan dengan melihat signifikansi koefisien moderasi. Diprediksi koefisien moderasi negatif yang berarti pada bank dengan corporate governance yang bagus peningkatan manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) lebih kecil dibandingkan bank dengan variabel CG yang buruk.

Operasionalisasi Variabel

Komponen Diskresioner dari CKPN (DLLP)

Cadangan Kerugian penurunan nilai (*Loan loss Provision*) terdiri dari komponen diskresioner (DLLP_{it}) dan nondiskresioner (NDLLP_{it}). Mengikuti penelitian terdahulu (Beaver dan Engel, 1996 dan Kanagaretnam et al., 2004) berikut adalah model yang digunakan untuk mengestimasi komponen nondiskresioner dari CKPN:

$$LLP_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 NPL_{it-1} + \alpha_3 \Delta NPL_{it} + \alpha_3 \Delta NLOAN_{it} + \epsilon_{it}, \dots \dots \dots (model 3)$$

Dimana:

LLP_{it} = saldo CKPN dibagi total aset awal tahun

NPL_{it} = saldo awal non performing loan (kredit yang bermasalah) dibagi total aset awal tahun.

Kredit yang bermasalah terdiri terdiri dari kredit yang diberikan yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar, (c) diragukan, dan (d) macet. Dibagi total aset awal tahun.

ΔNPL_{it} = selisih *non performing loan* t dengan *non performingloan*-1 dibagi total aset yang diberikan awal tahun

$\Delta NLOAN_{it}$ = Perubahan nilai kredit yang diberikan dibagi total aset yang diberikan awal tahun

Pada model satu independen variabel adalah komponen nondiskresioner CKPN (NDLLPP) sedangkan komponen diskresionernya (DLLP) adalah nilai residunya.

Variabel penerapan PSAK 50/55 (POST)

Variabel yang menunjukkan dampak dari penerapan PSAK 50/55 adalah variabel dummy POST. Dimana bila bank sudah secara penuh menerapkan PSAK 50/55 akan diberi nilai 1 sedangkan sampel bank yang belum menerapkan PSAK 50/55 diberi nilai 0.

Variabel kualitas Corporate Governance internal bank (CG)

Variabel CG merupakan variabel yang mengukur kualitas corporate governance internal bank. Kualitas Corporate Governance di bank diukur dengan menggunakan indeks komposit corporate governance yang berasal dari laporan tata kelola tahunan bank. Indeks komposit corporate governance merupakan *selft assesment* dari bank atas pelaksanaan good corporate governance dibank yang meliputi aspek : (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi; (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; (4) penanganan benturan kepentingan; (5) penerapan fungsi kepatuhan bank; (6) penerapan fungsi audit intern; (7) penerapan fungsi audit ekstern; (8) penerapan fungsi manajemen resiko dan pengendalian intern; (9) penyediaan dana pihak terkait dan dana besar; (10) Transparansi; dan (11) rencana strategis bank. Semakin rendah nilai komposit semakin baik pelaksanaan good corporate governance bank.

Auditor Spesialis Industri (SPEC)

Mengikuti penelitian terdahulu (Khrisnan 2003 dan Kanagaretnam et al. 2009) penelitian ini menggunakan pangsa pasar yang dikuasai KAP. Pangsa pasar diukur berdasarkan total aset klien yang diaudit oleh KAP dibanding total aset perusahaan pada seluruh industri. KAP dikatakan auditor spesialis bila pangsa pangsa pasarnya melebihi 30%.

Struktur Kepemilikan (CONFAM dan CONFOR)

Dikur dengan menggunakan dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah keluarga (CONFAM). Untuk pengendalian asing dengan dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah pihak asing (baik institusi keuangan ataupun perusahaan asing). Penelitian ini mengacu pada definisi kepemilikan keluarga berdasarkan Arifin (2003) dalam Siagian *et al.* (2006) yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat, yang bukan merupakan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).

Variabel Kontrol

Mengikuti penelitian terdahulu variabel kontrol yang digunakan adalah yang secara konsisten berdasarkan penelitian terdahulu (Ashbaugh et al. 2003 dalam Kanagaretnam et al. 2010) mempengaruhi manajemen laba yaitu pertumbuhan (GROWTH) dan ukuran bank (SIZE) juga dimasukkan juga sebagai variabel kontrol. Selain itu laba sebelum pencadangan kerugian penurunan nilai (EBPT) juga dimasukkan sebagai variabel pengendali. Kanagaretnam et al. (2003) menemukan bank dengan variabilitas laba sebelum pencadangan kerugian penurunan nilai yang tinggi cenderung melakukan manajemen laba melalui *loan loss provision*. Dummy GOVT digunakan sebagai variabel independen untuk mengontrol adanya perbedaan monitoring pada bank yang dikendalikan pemerintah.

Tehnik analisis data

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel penelitian ini menggunakan *Least Square (LS)* atau *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* (Nachrowi dan Usman, 2006). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan dengan *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Penelitian ini menggunakan *Hausman Test* untuk menentukan estimasi parameter yang terbaik apakah menggunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Program yang digunakan Eviews6. Pengujian

hipotesis dilakukan dengan melakukan uji-t terhadap koefisien regresi. Uji F juga dilakukan untuk menguji uji signifikansi koefisien regresi secara bersama-sama.

HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bank-bank sampel dapat dilihat pada tabel 1 pada lampiran.

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa 47.2 % bank sampel pemegang saham pengendalinya adalah asing dan 25 % dari sampel pemegang saham pengendalinya keluarga. Sisanya adalah bank yang dikendalikan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). 22.2 % bank sampel diaudit oleh auditor spesialis. Pada tahun 2009 dan 2010 satu KAP yang sama (salah satu KAP Big 4) memiliki pangsa pasar berturut-turut 47% dan 46% (diatas 30%) sehingga memenuhi kriteria auditor spesialis (tidak ditabulasikan). Rata-rata komponen diskresioner dari cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) negatif (-0.0004) dengan variasi yang cukup tinggi. Rata-rata bank melaporkan keuntungan (laba) sebelum cadangan kerugian penurunan nilai kredit (*loan loss provision*). Sampel bank seimbang antara yang belum menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) di tahun 2009 dan yang sudah secara penuh menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) ditahun 2010.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba bank-bank di Indonesia

Hasil regresi analisis model 1 untuk pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel2 pada lampiran. Variabel POST signifikan negatif tidak sesuai ekspektasi. Ini berarti setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terjadi penurunan manajemen laba pada bank-bank di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dalam perhitungan pencadangan penurunan nilai kredit berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) harus berdasarkan data historis default kredit bank atau dengan kata lain harus memakai sumber data yang diambil dari data-data transaksi minimal tiga tahun atau lima tahun sebelumnya sehingga sulit bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. SPEC negatif

signifikan hal ini sesuai dengan temuan Solomon *et al.* (1998) menemukan bahwa pengetahuan spesifik industri mempengaruhi kinerja auditor terutama dalam tugas analisa spesifik industri.

Variabel CONFOR negatif signifikan sesuai ekspektasi konsisten dengan dugaan bank asing memiliki sumber daya teknologi informasi dan sumber daya manusia yang lebih baik dibanding bank lainnya sehingga dalam perhitungan pencadangan penurunan nilai kredit (*loan loss provision*) lebih akurat dan andal. Variabel CONFAM negatif tidak sesuai ekspektasi ini berarti *alignment effect* pada bank-bank di Indonesia lebih besar dibandingkan *entrenchment effect* akibat kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan keluarga tinggi mendorong pemegang saham pengendali (keluarga) untuk lebih memonitor manajemen sehingga mengurangi perilaku oportunistik manajer. Namun demikian ada kemungkinan hasil ini disebabkan karena dalam penelitian ini pengukuran pengendalian keluarga kurang ideal karena tidak memasukkan variabel indikator apakah terdapat *divergence* (selisih) antara control right dan cashflow right karena tidak tersedianya data. Berdasarkan penelitian terdahulu (Bebhuck *et al.*, 2000; Claessens *et al.*, 2002) insentif untuk melakukan *entrenchment* akan semakin besar dengan semakin besarnya selisih antara *control right* dengan *cashflow right*.

EBPT signifikan positif konsisten dengan hasil temuan Kanagaretnam *et al.* (2004) yaitu bank dengan tingkat laba sebelum dikelola (*premanaged earning*) yang tinggi terbukti melakukan manajemen laba dengan menggunakan komponen diskresioner dari *loan loss provision* untuk mengurangi variabilitas laba. Koefisien *loan loss provision* tahun lalu positif signifikan sesuai ekspektasi. Variabel kontrol PYLLP signifikan sesuai ekspektasi.

Pengujian pengaruh moderasi corporate governance terhadap pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba bank-bank di Indonesia

Hasil regresi analisis model 1 untuk pengujian hipotesis 2,3a, 3bdan 4 dapat dilihat pada tabel 3 pada lampiran. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesa 2 ditolak: Mekanisme corporate governance tidak mengurangi praktik manajemen laba di bank setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Bahkan pada model lengkap (model 2)

interaksi antara kualitas corporate governance bank (CG) dengan variabel setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) signifikan positif (pada tingkat 10%). Hal ini mungkin menunjukkan bahwa: (1) pada bank mekanisme corporate governance berdasarkan undang-undang saja tidak cukup memadai untuk memonitor dan mengelola bank yang kompleks. Morgan (2002) bank adalah industri yang sangat kompleks dan cenderung *opaque* (buram/tidak mudah ditembus).; (2) pengukuran yang menggunakan skor penilaian bank atas mekanisme internal corporate governance perusahaan kurang tepat dalam mengukur kualitas mekanisme internal corporate governance bank; (3) Mekanisme internal corporate governance bank-bank di Indonesia hanyalah sejauh untuk memenuhi undang-undang saja (peraturan Bank Indonesia) tetapi dalam pelaksanaannya tidak efektif.

2. Hipotesa 3a diterima: Pada model 2(a) variabel interaksi antara pengendalian keluarga (FAM) dengan variabel dummy penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) signifikan positif yang berarti pada bank yang dikendalikan keluarga terjadi peningkatan manajemen laba setelah diterapkannya PSAK 50/55 (revisi 2006). Hal ini kemungkinan menunjukkan: (1) setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) memberikan peluang (diskresi lebih) bagi bank-bank yang dikendalikan keluarga untuk melakukan manajemen laba guna menutupi entrenchment yang dilakukan pemegang saham pengendali; (2) Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) cukup kompleks dan membutuhkan data historikal 3 sampai 5 tahun kebelakang. Bank-bank keluarga yang menjadi sample dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan bank yang dikendalikan oleh pemerintah ataupun asing sehingga memiliki sumber daya teknologi informasi dan sumber daya yang lebih terbatas sehingga dalam perhitungan pencadangan penurunan nilai kredit setelah penerapan PSAK revisi ini menjadi kurang akurat dan andal. Namun demikian pada model 2 setelah dimasukkan juga moderasi dengan mekanisme internal CG variabel interaksi POST dan FAM menjadi tidak signifikan walaupun koefisiennya masih positif sesuai ekspektasi. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peningkatan manajemen laba pada bank keluarga sebagian dijelaskan oleh lemahnya mekanisme internal corporate governance pada bank keluarga.
3. Hipotesa 3b diterima: Variabel interaksi antara POST dan FOR signifikan positif. Ini berarti pada bank-bank dengan pengendali asing terjadi penurunan manajemen laba setelah penerapan PSAK

50/55 (revisi 2006) sesuai dengan dugaan bahwa bank yang dimiliki oleh asing memiliki kelebihan karena memiliki akses yang lebih terhadap teknologi yang superior, terutama teknologi informasi untuk pengumpulan dan penilaian informasi kuantitatif sehingga memungkinkan bank asing untuk menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan lebih baik.

4. Hipotesa 4b diterima: Variabel interaksi antara POST dan FOR signifikan positif yang berarti pada bank-bank yang diaudit oleh auditor spesialis industri terjadi penurunan manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) konsisten dengan temuan Solomon *et al.* (1998) bahwa pengetahuan spesifik industri mempengaruhi kinerja auditor terutama dalam tugas analisa spesifik industri.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba di perbankan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan meneliti apakah mekanisme internal corporate governance bank, pengendalian oleh asing, pengendalian oleh keluarga, dan kualitas audit dapat mengurangi dampak peningkatan manajemen laba yang disebabkan karena penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Data yang digunakan adalah tahun 2009 yaitu periode sebelum diterapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan tahun 2010 periode setelah diterapkannya PSAK 50/55 (revisi 2006). Hasil pengujian menemukan terjadi penurunan praktik manajemen laba di perbankan setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Penurunan praktik manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) mungkin disebabkan karena berdasarkan PSAK revisi ini penghitungan cadangan kredit penurunan nilai harus berdasarkan data historis *default* kredit bank atau dengan kata lain harus memakai sumber data yang diambil dari data-data transaksi minimal tiga tahun atau lima tahun sebelumnya sehingga sulit bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Mekanisme corporate governance internal bank tidak signifikan mengurangi praktik manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 revisi (2006). Hal ini mungkin disebabkan karena mekanisme corporate governance yang terdapat di bank bank di Indonesia hanya lebih sebagai pemenuhan regulasi. Terjadi peningkatan manajemen laba pada perusahaan yang dikendalikan keluarga setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Kemungkinan hal ini disebabkan karena keterbatasan teknologi informasi dan sumber daya manusia sehingga mengurangi akurasi dan keandalan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 50/55 (revisi 2006) pada bank yang dikendalikan keluarga. Kemungkinan lain adalah terjadi peningkatan manajemen laba oleh pemegang saham pengendali (keluarga) untuk menutupi ekspropriasi yang dilakukannya. Sesuai dengan hipotesis terjadi penurunan manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) pada bank yang dikendalikan oleh asing dan kualitas audit yang diukur dengan proksi auditor spesialis.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perbankan sehingga tidak dapat digeneralisasi ke industri lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan dari industri lain. Data yang digunakan hanya 72 tahun perusahaan, dengan menggunakan data yang lebih banyak ada kemungkinan hasil dari penelitian bisa berbeda.
2. Hasil penelitian sangat tergantung pada model penghitungan akrual diskresioner. Adanya kemungkinan kesalahan pengklasifikasian nondiskresioner menjadi akrual diskresioner dapat menjelaskan hubungan signifikan antara penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba.

3. Dalam proksi pengendalian oleh keluarga hanya berdasarkan kepemilikan dari imediate shareholder, yang ideal adalah memperhitungkan adanya selisih antara control right dan cashflow right.
4. Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana tipe auditor (*principle oriented*, *rules oriented*, atau *client oriented*) mempengaruhi dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Barth, M. E. 2004. Fair values and financial statement volatility. Working paper, Stanford University.
- Beatty, A., S.L. Chamberlain and J. Magliolo. 1995. Managing financial reports of commercial banks: the influence of taxes, regulatory capital, and earnings. *Journal of Accounting Research*, 33, 231-261.
- Beatty, A. and D.G. Harris. 1999. The effects of taxes, agency costs, and information asymmetry on earnings management: A comparison of Public and Private Firms. *Review of Accounting Studies*, 4, 299-326.
- Beaver, W., and E.E. Engel. 1996. Discretionary behavior with respect to allowance for loan losses and the behavior of securities prices. *Journal of Accounting and Economics*, 34 (1), 177-206.
- Berger, A., Clarke, G., Cu;;, R., Klapper, L., Udell, G. 2003. Corporate Governance and Bank Performance: A Joint Analysis of the Static, Selection, and Dynamic Effects of Domestic, Foreign, and StateOwnership, Including Domestic M&As, Foreign Acquisitions, and Privatization. SSRN Working Paper.
- Caprio, G., Laeven, L., levine, R. 2006. Governance and Bank Valuation. SSRN Working Paper.
- Collins, D.W and S.P. Kothari. 1989. An analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients. *Journal of Accounting and Economics*, 11 (2-3), 143-182.
- Cornett, M., McNutt, J., Tehranian, H. 2009. Corporate Governance and Earning Management at large U.S. bank Holding Companies. *Journal of Corporate Finance*, 15, 412-430.

- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics* 3, 183-99.
- Fiechter, Peter. 2011. The Effects of the Fair Value Option under IAS 39 on the Volatility of Bank Earnings. *Journal of International Accounting Research*, 85-108.
- Fitriany. 2011. *Analisis komprehensif pengaruh kompetensi dan independensi akuntan public terhadap kualitas audit*. Disertasi doctor, Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia.
- Firoz, C A Mohammad. Ansari, A Aziz. Akhtar, Kahkashan.2011. IFRS - Impact on Indian Banking Industry. *International Journal of Business and Management*, 277-283.
- Givoly, Dan., Garla K. Hayn, and Sharon P. Katz. 2010. Does public ownership of equity improve earnings quality. *The Accounting Review*, 85 (1), 195-222.
- Gebhardt, W.R., C.M.C. Lee and B. Swaminathan. 2001. Towards an implied cost of capital. *Journal of Accounting Research*, 39, 135-176.
- Gramling, A. A., dan D.N. Stone. 2001. Audit firm industry expertise: A review and synthesis of the archival literature. *Journal of Accounting Literature* 20, 71-105.
- Kanagaretnam, K., Chee Y.L., and Gerald J.L. 2010. Auditor reputation and earnings management: International evidence from the banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 34, 2318-2327.
- Kanagarertnam, K., Gerald J.L., Robert M. 2004. Earnings management to reduce earnings variability: evidence from bank loan loss provision. *Review of Accounting and Finance*, 3 (1), 128.
- Kilic, E., et all. 2010. *The impact of SFAS 133 on income smoothing by banks through loan loss provision*. Working paper, University of Houston
- Levin, Ross. 2004. The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and Evidence. World Bank Policy Research Working Paper.
- Malleta, M., dan A. Wright. (1996). Audit evidence planning: An examinations of industry error characteristics. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 15(1), 71-86.
- Morgan, D. 2002. Rating Banks: Risks and Uncertainty in an Opaque Industry. *American Economic Review* 92, 874-888.
- Moyer, S.E. 1990. Capital adequacy regulations and accounting choices in commercial banks. *Journal of Accounting and Economics*, 13, 123-154.

Nasution, Marihot. Doddy Setawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar

Owhoso, V. E., W. F. Messier, Jr., dan J.G. Lynch, Jr. 2002. Error detection by industry-specialized teams during sequential audit review. *Journal of Accounting Research* 40, 883-900.

Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Corporate Governance Bagi Bank Umum

Piot, Charles. Pascal D. Remmi J. 2011. IFRS Consequences on Accounting Conservatism within Europe: The Role of Big 4 auditors. Working Paper, University of Grenoble and CERAG-CNRS

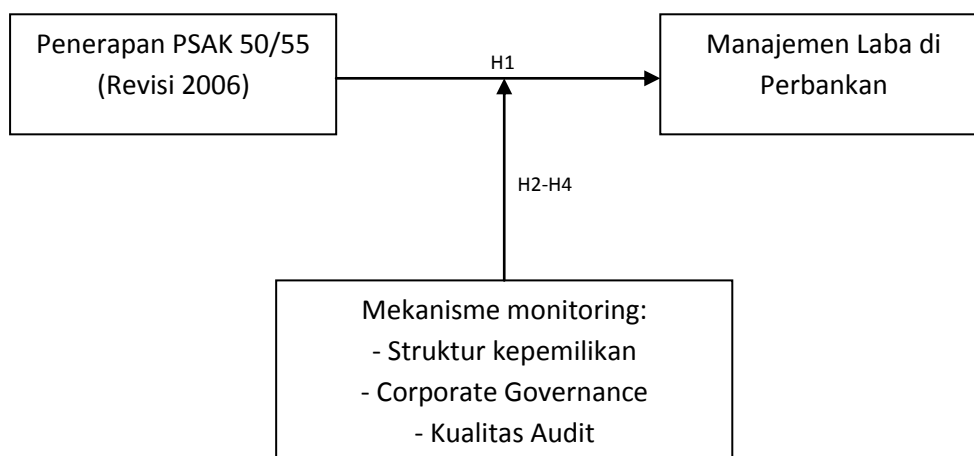
Solomon, I., M. D. Shields, dan O. R. Whittington. 1999. What do industry-specialist auditors know? *Journal of Accounting Research* 37 (Spring), 191-208.

Song, C. J. 2008. An evaluation of FAS 159 fair value option: Evidence from the banking industry. Working paper, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Wahlen, J.M. 1994. The nature of information in commercial bank loan loss disclosures. *The Accounting Review*, 69 (3), 455-478.

LAMPIRAN

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Tabel 1
Statistik Deskriptif-Model (1) & (2)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DLLP	-0.0297	0.0250	-0.0004	0.0127
SIZE	13.648	19.9242	16.8048	1.6019
EBPT	-0.0586	0.0752	0.0299	0.0227
GROWTH	-0.8168	0.6259	0.1112	0.2442
PYLLP	0.0004	0.0715	0.0188	0.0159
	Proporsi Dummy = 1	Proporsi Dummy = 0		
POST	50.0%	50.0%		
GOV	25.00%	25.0%		
SPEC	22.2%	77.8%		
CG	45.8%	54.2%		
CONTFAM	25.0%	75.0%		
CONTFOR	47.2%	52.8%		

Definisi variabel sebagai berikut: DLLP= komponen diskresioner dari cadangan kerugian penurunan nilai (*loan loss provision*) dibagi total aset awal tahun; POST = dummy variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan telah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) , dan 0 jika lainnya; CG = kualitas corporate governance bank diukur dengan menggunakan dummy variabel, diberi nilai 1 jika indeks komposit GCG lebih kecil dari median (CG berkualitas tinggi) dan 0 jika lainnya; SPEC= dummy variabel diberi nilai 1 jika bank i pada tahun t diaudit oleh kantor akuntan yang merupakan spesialis di industri perbankan dan 0 jika lainnya; CONTFAM= dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah keluarga; CONTFOR= dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah pihak asing (baik institusi keuangan ataupun perusahaan asing) ; GOVT = dummy variabel diberi nilai 1 jika bank adalah bank yang dimiliki pemerintah pusat ataupun daerah, 0 lainnya; EBPT = laba sebelum pajak dan CKPN pada tahun t dibagi total aset awal tahun; PYLLP = loan loss provision tahun sebelumnya dibagi total aset awal tahun; SIZE= Ukuran bank diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset akhir tahun; GROWTH= pertumbuhan total aset dari total aset awal tahun t

Tabel 2

Hasil Pengujian hipotesis 1

$$DLLP_{it} = \beta_0 + \beta_1 POST + \beta_2 CG_{it} + \beta_3 SPEC_{it} + \beta_4 CONFAM_{it} + \beta_5 CONFOR_{it} + \beta_6 GOV_{it} + \beta_7 EBTP_{it} + \beta_8 PYLLP_{it} + \beta_9 GROWTH_{it} + \beta_{10} SIZE_{i,t} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (model 1)$$

Variabel	Hipotesa	Coefficient	p-Value
C		-0.0112	0.1106
POST	H1: +	-0.0007	0.0989*
SPEC	-	-0.0060	0.00000***
CONFAM	+	-0.0038	0.0428**
CONFOR	-	-0.0049	0.00000***
CG	-	0.0015	0.2314
SIZE	+/-	0.0006	0.1813
EBPT	+	0.0972	0.0192**
GROWTH	+	0.0012	0.3454
PYLLP	+	0.1753	0.0322**
GOV	+/-	-0.0026	0.1309
Adjusted R Square	0.49317		
F-Statistic	7.908636		
P value (F-Statistic)	0.000		

Definisi variabel sebagai berikut: DLLP= komponen diskresioner dari cadangan kerugian penurunan nilai (*loan loss provision*) dibagi total aset awal tahun; POST = dummy variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan telah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) , dan 0 jika lainnya; CG = kualitas corporate governance bank diukur dengan menggunakan dummy variabel, diberi nilai 1 jika indeks komposit GCG lebih kecil dari median (CG berkualitas tinggi) dan 0 jika lainnya; SPEC= dummy variabel diberi nilai 1 jika bank i pada tahun t diaudit oleh kantor akuntan yang merupakan spesialis di industri perbankan dan 0 jika lainnya; CONFAM= dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah keluarga; CONFOR= dummy variabel, diberi nilai 1 jika pemegang saham pengendali adalah pihak asing (baik institusi keuangan ataupun perusahaan asing) ; GOVT = dummy variabel diberi nilai 1 jika bank adalah bank yang dimiliki pemerintah pusat ataupun daerah, 0 lainnya; EBPT = laba sebelum pajak dan CKPN pada tahun t dibagi total aset awal tahun; PYLLP = loan loss provision tahun sebelumnya dibagi total aset awal tahun; SIZE= Ukuran bank diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset akhir tahun; GROWTH= pertumbuhan total aset dari total aset awal tahun t

***Signifikan 1% ** signifikan 5% *signifikan 10%

Tabel 3
Hasil Pengujian hipotesis 2, 3a, 3b, dan 4

$DLLP_{it} = \beta_0 + \beta_1 POST + \beta_2 CG_{it} + \beta_3 SPEC_{it} + \beta_4 CONFAM_{it} + \beta_5 CONFOR_{it} + \beta_6 POST * CG_{it} + \beta_7 POST * SPEC_{it} + \beta_8 POST * CONFAM_{it} + \beta_9 POST * CONFOR_{it} + \beta_{10} PRIVATE_{it} + \beta_{11} EBTP_{it} + \beta_{12} PYLLP_{it} + \beta_{13} GROWTH_{it} + \beta_{14} SIZE_{it}, t, \dots \dots \dots (model\ 2)$

Keterangan Model: Model 2(a) adalah model dengan moderasi corporate governance; Model 2 (b) adalah model dengan moderasi struktur kepemilikan; Model (2) adalah model dengan moderasi corporate governance dan struktur kepemilikan (model lengkap)

Variabel	Hipotesa	Model 2(a)		Model (2b)		Model 2	
		Coef	p-Value	Coef	p-Value	Coeff	p-Value
C		-0.01488	0.06475	-0.0163	0.043	-0.01197	0.09915
POST	H1: +	0.00152	0.2085	0.0024	0.07855*	0.001444	0.2256
SPEC	-	0.00104	0.36395	-0.0006	0.420	-0.00012	0.4849
CONFAM	+	-0.00366	0.1605	-0.0053	0.05895*	-0.00572	0.0376**
CONFOR	-	-0.00446	0.1115	-0.0003	0.468	3.27E-05	0.49605
CG	-	0.00074	0.35645	0.0021	0.0772*	0.000102	0.4774
SIZE	+/-	0.00065	0.1438	0.0006	0.137	0.000409	0.23465
EBPT	+	0.15980	0.0026**	0.1111	0.01115**	0.125825	0.0082***
GROWTH	+	0.00061	0.4341	0.0054	0.0615*	0.005576	0.0692*
PYLLP	+	0.08979	0.19445	0.1331	0.101	0.136291	0.0973*
GOVT	+/-	-0.00251	0.2406	-0.0015	0.308	-0.00158	0.2927
POST*CG	H2: -	0.00221	0.2017			0.003855	0.06995*
POST*FAM	H3a: +			0.0053	0.0321**	0.003801	0.1113
POST*FOR	H3b: -			-0.0063	0***	-0.0077	0.00515***
POST*SPEC	H4 :-	-0.01171	0.0005***	-0.0084	0.0049**	-0.00945	0.0037***
Adjusted R Square			0.49317		0.776231		0.911268
F-Statistic			7.908636		19.94547		53.08305
P value (F-Statistic)			0.000		0.0000		0.0000

Definisi variabel seperti yang dijelaskan pada tabel 4.3.

***Signifikan 1% ** signifikan 5% *signifikan 10%

SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01/SE/1979
TANGGAL : 09 MARET 1979

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KETERANGAN PERORANGAN

Nama Lengkap
NIP
Tanggal Lahir / Umur
Tempat Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Status Pernikahan

Viska Anggraita M.S.Ak.
060903049
27 Februari 1978 / 34
Jakarta
Wanita
Islam
Menikah

Alamat Rumah

Batu Tulis III No.107 RT 10 RW 3 Kelurahan Batu Ampar, Jakarta Timur

Kode Pos
No. Telepon
No. HP
E-mail

13520
021-80890071
08159116882
viskaviska257@yahoo.co.id



PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

NO.	NAMA PENDIDIKAN	JENJANG	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT
1	SMU Negeri 14	SLA	Fisika	1996	Jakarta
2	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	S1	S1-Akuntansi	2000	Depok
3	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	S2	Pasca sarjana Ilmu Akuntansi	2009	Depok

RIWAYAT PEKERJAAN

NO.	NAMA PEKERJAAN	PERIODE	INSTANSI
1	Asisten Dosen	2000 ~ 2009	DOA, FEUI
2	Auditor	2000 ~ 2006	KAP HTMH-Deloitte
3	Dosen Pengajar	2009 ~ 2010	DOA, FEUI

PENGALAMAN

SIMPOSIUM / SEMINAR / PANITIA

NO.	KEGIATAN	SIFAT / PERANAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Current Development in Management Accounting Research	Peserta	01 Januari 2008	
2	The 2nd Accounting Conference, The 1st Doctoral Colloquium and Accounting Workshop	Peserta	01 Januari 2008	

PUBLIKASI

NO.	JUDUL	PERAN (Jmlah Anggota)	TAHUN	KETERANGAN
1	Hubungan Intellectual Capital dan Kinerja Perusahaan Bank: Studi Analisis dengan Menggunakan SEM: Viska Anggraita	Perorangan (0)	2008	Dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Integrity, Volume 2 No.3- Desember 2008
2	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Job Satisfaction Auditor dan Hubungannya dengan Performance dan Keinginan Berpindah Kerja Auditor. (Perbandingan Pada KAP Besar, KAP Menengah Dan KAP Kecil).: Fitriany, Lindawati Gani, Sylvia Veronica Siregar, Viska Anggraita, Arywati	Anggota (4)	2010	Dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 13 – 14 Oktober 2010
3	Audit tenure, Audit Rotation, and Audit Quality: The Case of Indonesia: Fitriany, Sylvia Veronica Siregar, Ary Wibowo, Viska Anggraita	Anggota (3)	2010	Dipresentasikan di Asian Pacific Conference 22nd , GoldCoast Australia, 7-8 November 2010
4	The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intention: Comparison between High and Low Performance Auditor: Fitriany, Agung Nugroho Soedibyo, Viska Anggraita dan Arywati	Anggota (3)	2010	Dipresentasikan di The 3rd International Accounting Conference and The 2nd Doctoral Colloquium, Bali. 27– 28 October 2010
5	The Effects of Corporate Governance on Earning Management Motivation (Opportunistic Vs Efficient) Study on Non-Financial Companies Listed on Indonesian Stock Exchange: Viska Anggraita	Perorangan (0)	2011	Dipresentasikan di 12th Asian Academic Accounting Association, 2011 Bali

PENELITIAN / RISET

NO.	PENELITIAN - KET - INSTANS/MITRA	WAKTU RISET	PENELITI
1	Hibah FEUI Judul: Rotasi Audit, Kualitas Audit, dan Persepsi Investor. Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Menti keuangan KMK No. 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik FEUI	Jan 2009 – Des 2009	Sylvia Veronica Siregar , Fitriany, Viska Anggraita, Ary Wibowo
2	Hibah Unggulan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Job Satisfaction Auditor dan hubungannya dengan Keinginan Berpindah Kerja Auditor RUUI	Jan 2010 – Des 2010	Fitriany , Lindawati Gani, Sylvia Veronica Siregar, Viska Anggraita.
3	Hibah Pasca Pengaruh Rotasi Audit, Tenure, Spesialisasi, dan Workload terhadap Kualitas Audit dengan kualitas Komite Audit sebagai Variabel pemoderasi RUUI	Mar 2010 – Des 2010	Prof Sidharta Utama SE.MBA.Phd , Fitriany <i>Mhs: Viska Anggraita</i>
4	Hibah Riset Awal UI Pengaruh persaingan JAAs Audit terhadap Kualitas Audit: peranan corporate governance dan regulasi rotasi FEUI	Nov 2011 – Ags 2012	Viska Anggraita , Fitriany, Sandra Aulia
5	Hibah riset Unggulan UI Analisis Cost dan Benefit Pendidikan profesi Akuntansi di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan FEUI	Nov 2011 – Ags 2012	Fitriany , Viska Anggraita, Sandra Aulia, Agung Nugroho

KETERANGAN KELUARGA**BAPAK DAN IBU KANDUNG**

ORANG TUA	NAMA
Bapak	Kelik sumiarsono
Ibu	Wiwik hendrawati

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Depok, 25 April 2012

Yang membuat,

(Viska Anggraita M.S.Ak.)